

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN – INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Bisnis Program Studi Strata Satu (S-1)
Terakreditasi Baik. Berdasarkan keputusan LAMEMBA
No:527/DE/A.5/AR.10/VII/2023, menyatakan bahwa :



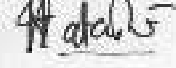


Nama : Indah Ianti Gultom

NPM : 19210034

Program Studi : Administrasi Bisnis

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Comprehensive Sarjana Administrasi
Bisnis Program Studi Strata Satu (S-1) pada hari Jumat, 19 Januari 2024,
dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Drs. Nalom Siagian, MM	1. 
2. Sekretaris	: Drs. Kepler Sinaga, MM	2. 
3. Penguji Utama	: Drs. Natalia E. T. Sihombing, Msi	3. 
4. Anggota Penguji	: Drs. Kepler Sinaga, MM	4. 
5. Pembimbing Utama	: Dr. Drs. Nalom Siagian, MM	5. 

diketahui,
ditekan


Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki beragam sumber daya. Sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam seharusnya memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk bangsa Indonesia bermata pencaharian sebagai seorang petani atau bekerja di sektor pertanian, inilah mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara agraris dan sebagian lainnya hidup dari sektor industri, perdagangan dan jasa. Oleh sebab itu ada sektor pertanian dan ada sektor non pertanian. Sebagian besar masyarakat pedesaan bergerak dalam sektor pertanian yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah bagi kita bangsa Indonesia.

Dewasa ini, negara kita memerlukan upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional yang tertuang dalam pembangunan nasional seperti yang telah dirumuskan dalam garis-garis besar Haluan Negara, yaitu untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran yang adil dan merata baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia khususnya di daerah pedesaan seperti di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman, para petani dihadapkan dengan beberapa masalah pokok. Yang pertama mengenai permodalan. Bagi petani modal adalah sumber dana yang paling penting untuk dapat digunakan dalam mengelola lahan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Modal menjadi salah satu masalah yang paling sering dialami oleh para petani. Minimnya modal usaha untuk pengelolaan lahan pertanian menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan pemasukan. Kurangnya modal mengakibatkan petani melakukan peminjaman modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dapat mengolah lahan pertanian. Yang kedua itu masalah dalam menggunakan modal usaha. Para petani memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda dalam hal bagaimana cara menggunakan modal usaha untuk pengelolaan lahan pertanian dengan baik. Di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman para petani diperhadapkan dengan masalah tersebut. Minimnya pengetahuan para petani dalam menggunakan bantuan modal seperti misalnya pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka petani butuh pendampingan untuk menggunakannya. Pendampinglah yang nantinya akan membantu, mengarahkan dan mengajari petani untuk dapat mengelola lahan pertanian dengan bantuan modal. Pendampingan dilaksanakan guna membantu mencapai terwujudnya pengolahan lahan pertanian dan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap petani. Pendampingan disini di dapat para petani dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang memberikan arahan dalam mengelola lahan pertanian dengan bantuan modal yang telah ada. Pendampingan oleh penyuluh pertanian dari mulai kelompok tani yang memberikan bantuan berupa arahan bagi pelaku utama dan

pelaku usaha untuk dapat meningkatkan produktivitas usaha taninya demi mencapai kesejahteraan.

Pemerintah mengajak beberapa pihak bekerjasama untuk mengatasi kesulitan petani dalam hal modal. Salah satu cara pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan membantu permodalan petani dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini pemerintah menggandeng pihak perbankan untuk ikut andil.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung dengan fasilitas penjamin untuk usaha produktif yang penyalurannya melalui bank dan sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana Bank Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk kredit yang berlaku dibidang pertanian, dimana kredit ini diberikan secara tunai bagi petani yang benar-benar membutuhkan dan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya. Dengan modal pinjaman ini mereka dapat menggunakannya untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan biaya tenaga pengolah lahan pertanian.

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota, serta mengembangkannya dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pendampingan dalam mencapai kesejahteraan petani merupakan suatu cara yang dapat dilakukan terkait dengan penyaluran informasi yang dibutuhkan.

Dari permasalahan di atas, pengaruh pemberian Kredit Usaha (KUR) dan pendampingan usaha diharapkan dapat memajukan petani dan menjadikannya sebagai basis ekonomi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan kemajuan ekonomi dan dengan pendampingan ini diharapkan petani dapat lebih memahami sistematika dalam mengelola lahan pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap studi kasus guna sebagai syarat untuk penyelesaian tugas akhir dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban”. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendampingan Usaha dan Kesejahteraan Petani.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban?
2. Apakah Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh Terhadap Pendampingan Usaha di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban?
3. Apakah Pendampingan Usaha berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban?
4. Apakah Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani melalui Pendampingan Usaha di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada maka diketahui Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendampingan Usaha di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman?
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kesejahteraan Petani melalui Pendampingan Usaha di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman?

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dalam penulisan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan manfaat tambahan pengetahuan mengenai Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman.

2. Bagi Petani

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan pertimbangan bagi petani penerima bantuan modal Kredit Usaha Rakyat

(KUR) untuk dapat melakukan peminjaman modal untuk pengelolaan lahan pertanian dan dengan adanya bantuan pendampingan usaha.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai peran serta pemerintah dalam memberikan kebijakan dan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan yang berdampak penuh terhadap keberlangsungan petani.

4. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi Universitas HKBP Nommensen Medan mengenai penelitian tentang Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman yang mana selama ini referensinya masih sedikit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh suatu barang atau memperoleh suatu pinjaman uang dengan sistem pembayaran berupa cicilan atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Kasmir (2013:85) Kredit adalah Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit Modal Kerja dan/atau Kredit Investasi yang diberikan oleh bank kepada debitur baru yang memenuhi syarat akan tetapi belum bankable. Untuk membantu memberdayakan, memperkuat serta mengembangkan para petani dan peternak serta pelaku agribisnis, pemerintah telah meluncurkan berbagai program kredit atau pinjaman yang mendorong peminjam terbatas dalam bentuk potongan bunga, tetapi masih pada tataran umum dalam prosedur sistem perbankan.

Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Nining Sudiyarti, Vivin Fitryani dan Neti Ayustina (2019:264) :

Komite kebijakan Kredit Usaha Rakyat (2010) mendefinisikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (non bankable).

Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit model pembayaran terjamin dan kredit ini dirancang untuk para pemilik usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai oleh bank. Pemerintah mendukung dan memberikan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dengan tujuan memajukan, memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia. Adapun tata cara untuk mendapatkan pinjaman dan/atau kredit usaha rakyat ialah sebagai berikut :

1. Petani/peternak, kelompok tani, gapoktan, asosiasi petani, dan koperasi yang membutuhkan kredit dapat mengajukan permohonan ke cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
3. Menyerahkan surat permohonan kredit/pembiayaan.
4. Bank pelaksana akan menilai kelayakan suatu usaha debitur.
5. Keputusan kredit/pembiayaan dibuat oleh bank pelaksana.

Menurut Wangsawidjaya (2020:75-76) Pengertian Kredit Usaha Rakyat yaitu :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan khusus kepada usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif, untuk membiayai sektor perdagangan serta sektor jasa. UMKM-K ini pada umumnya belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana, antara lain dalam hal

penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank pelaksana (belum bankable). Oleh karena itu, KUR didukung dengan fasilitas penjamin kredit oleh lembaga penjamin.

Menurut Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan (2013:107-108) pengertian Kredit Usaha Rakyat yaitu :

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

Dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.1.1.1 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

1. UMKM-K UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum

- I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.;
- c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun investasi, dengan ketentuan:
 - a. Setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif pertahun;
 - b. Di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif pertahun.
 3. UMKM-K yang telah mendapatkan KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable* dengan ketentuan :
 - a. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk kredit modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit investasi terhitung mulai tanggal efektifnya perjanjian kredit antara bank pelaksana dan UMKM-K;
 - b. Restrukturisasi dapat diberikan dengan persyaratan pinjaman yang disetujui bersama antara bank pelaksana dan UMKM-K, kecuali untuk penambahan jangka waktu kredit maksimum satu tahun untuk kredit modal kerja dan 2 (dua) tahun untuk kredit investasi;
 - c. Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat total plafond pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
 4. Besarnya imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:
 - a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihiyung dari realisasi kredit.
 5. Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijamin kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bank Pelaksana.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas dan Tujuan Kredit Usaha

Rakyat adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum RP. 25.000.000,00. Sumber dana berasal dari Pemerintah yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum sembilan persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disediakan oleh Pemerintah. Masa pinjaman kredit untuk modal kerja maksimum tiga tahun. Bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

2.1.1.3 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada awal pelaksanaannya, Pemerintah melalui Komite Kebijakan menetapkan suku bunga KUR adalah sebesar 12%. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, Pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi sebesar 9%. Penetapan suku bunga KUR menjadi *single digit* sebagaimana dijelaskan, dimaksudkan untuk mendorong perbankan di Indonesia agar menetapkan suku bunga kredit menjadi *single digit*. Kebijakan ini dilanjutkan dengan penetapan suku bunga KUR sebesar 6% efektif per tahun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. (<https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>)

2.1.1.4 Indikator Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam Journal of Economic, Business and Engineering (Marfuah dan Sri, 2019:187) Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

1. Aspek Ketepatan Penggunaan

Ketepatan penggunaan dalam memperoleh modal usaha. Dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu pemilik usaha mendapatkan tambahan modal untuk perkembangan usahanya.

2. Aspek Ketepatan Jumlah Kredit

Menentukan besarnya pinjaman modal untuk aktivitas usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penentuan jumlah pinjaman usaha juga bisa menjadi prioritas untuk mengembangkan dan mengelola usaha.

3. Aspek Ketepatan Beban Kredit

Ketetapan beban kredit adalah indikator dimana dalam jumlah keuntungan atau pendapatan meningkat dari sebelumnya setelah melakukan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2.1.2 Pendampingan Usaha

Dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan hampir seluruh individu memerlukan pendampingan. Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Karena dalam pendampingan lebih pada pendekatan kebersamaan, kesejajaran, atau kesederajatan kedudukan. Para petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban membutuhkan pendampingan dalam mencapai kesejahteraan petani. Pendampingan yang dibutuhkan para petani yaitu pendampingan dalam menggunakan modal usaha guna dapat dilakukan dengan baik dalam pengelolaan lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan terhadap petani memberikan suatu arahan, pengajaran dan pembinaan bagaimana untuk

menggunakan modal usaha sehingga dengan demikian akan tercapai kesejahteraan petani. Pendampingan itu sendiri di dapatkan para petani dari adanya pendampingan dari penyuluhan pertanian, yang mana nantinya akan membantu para petani dalam menggunakan modal usaha. Petani akan diberi informasi terkait bagaimana pelaksanaan atau proses pengolahan lahan pertanian dengan baik.

Pendampingan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan pendamping dalam rangka pemberdayaan petani dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pemberdayaan dalam bidang pertanian salah satunya dapat dilakukan dengan pemberdayaan petani dalam wadah kelompok tani. Pemberdayaan petani/ Kelompok Tani dapat dilakukan dengan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, hubungan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Robin Jonathan (2017:9) Pendampingan merupakan serangkaian kegiatan memfasilitasi kelompok untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui cara-cara partisipatif dan dialogis. Pendampingan memiliki makna dan nilai yang mendalam pada proses dan bukan sekedar melaksanakan kegiatan.

Dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Eko Aristanto (2019:6) :

Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden (Inpres) 3 Tahun 2010 mengenai Program Pembangunan yang berkeadilan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia merupakan landasan hukum yang kuat dan mengikat bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di daerah masing-masing, tentunya dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah dan kelayakan usaha pelaku UMKM. Berbagai tindak lanjut dari peraturan di atas, yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, meliputi :

1. Membentuk forum komunikasi dan monitoring percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan tiga fungsi utama koordinasi, monitoring dan analisa terhadap permasalahan dan kendala penyaluran program Kredit Usaha Rakyat, yang dilaksanakan dalam pertemuan rutin.
2. Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dengan melibatkan Bank Pelaksana dan Penjaminserta UMM sebagai peserta sekaligus target calon nasabah program Kredit Usaha Rakyat.
3. Pengembangan pendamping Kredit Usaha Rakyat yang bertujuan mensosialisasikan KUR dan menjaring pelaku UMKM yang berpotensi dibiayai Kredit Usaha Rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pendampingan usaha adalah proses dari pemberdayaan masyarakat petani dengan melakukan berbagai aktivitas untuk memberikan arahan, pengajaran serta pembinaan bagi yang di dampingi guna mencapai suatu perubahan. Pendamping berperan aktif sebagai Fasilitator, komunikator dan Dinamisator. Akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa pendampingan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Pendampingan yang hendak dibutuhkan bagi para petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman adalah pendampingan berupa pengarahan atau pengajaran dalam menggunakan modal usaha dalam pengelolaan lahan pertanian yang diberikan oleh penyuluh pertanian dalam sebuah wadah yang disebut kelompok tani.

2.1.2.1 Tujuan Pendampingan Usaha

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Didalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Pendampingan bertujuan untuk membantu individu dan/atau kelompok

dalam pengembangan potensi, membantu agar mampu mandiri dalam berbagai hal baik itu dalam mencapai sumber penghasilan yang layak dan tetap.

Menurut Robin Jonathan (2017:9) Tujuan Pendampingan adalah sebagai berikut :

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan, yakni mengembangkan kemampuan, potensi dan sumber daya kelompok dampingan. Hal utama dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran untuk memahami hak dan tanggung jawabnya, sehingga sanggup mengembangkan potensi yang tersedia pada kelompok.

Menurut Deptan (2004:8), tujuan dari pendampingan antara lain :

<https://eprints.uny.ac.id/7814/3/bab%20%20-%2008102244027.pdf>

- a. Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
- b. Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- c. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.

2.1.2.2 Fungsi Pendampingan Usaha

Menurut Najiyati, Asmana dan Suryadiputra (dalam Setiyo Yuli Handono, dkk (2020:109-111) fungsi pendampingan yaitu:

Fungsi pendampingan merupakan peran atau tugas dari pendamping atau pemberdaya dalam pendampingan atau pemberdayaan masyarakat. Pendamping ini biasanya dalam program pemberdayaan masyarakat diistilahkan *community development worker* atau pendamping pemberdayaan masyarakat. Beberapa fungsi pendampingan antara lain:

1. Fungsi pendidik atau edukator, artinya pendamping dalam pemberdayaan masyarakat menjadi pendidik atau edukator yang memiliki fungsi melakukan edukasi atau pendidikan yang konstruktif atau membangun, bukan secara otoriter ataupun memaksa. Proses ini senantiasa melakukan pembelajaran atau pemberdayaan yang kreatif dan senantiasa mengembangkan aspek pemikiran atau tingkat kritis dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh peserta atau partisipan. Sesuai dengan pendapat Bucholtz dalam proses pendampingan dapat meningkatkan pengetahuan atau kemampuan anggota program karena dalam prosesnya terdapat pertukaran informasi antara pendamping dengan masyarakat atau antara masyarakat itu sendiri.

2. Fungsi pemotivasi atau motivator, artinya pendamping dalam melakukan pemberdayaan senantiasa memiliki fungsi memotivasi anggota atau masyarakat. Dalam memotivasi ini penekanan kepada anggota adalah memberi semangat atau kepercayaan diri pada diri peserta (anggota). Selain itu pendamping juga memberikan pada anggota untuk semangat dalam mengembangkan potensi dalam berusaha, percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan diri atau anggota. Ketertarikan partisipasi dari masyarakat juga akan meningkat dengan adanya pendampingan, sehingga masyarakat lebih memberikan perhatian kepada program pemberdayaan yang dilaksanakan.
3. Fungsi pemberi fasilitas atau fasilitator, sekaligus pendinamisan atau dinamisor, serta memberi inspirasi atau inspirator, artinya pendamping senantiasa memberikan layanan fungsi memfasilitasi anggota atau peserta dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan. Dalam memfasilitasi ini juga sekaligus mendinamiskan dan memberi inspirasi kepada anggota dalam sebuah perubahan yang lebih baik. Bentuk fasilitasi misalnya memfasilitasi anggota dalam diskusi menyelesaikan masalah, atau mencari solusi alternatif. Bentuk dari pendinamisan adalah senantiasa mendinamiskan anggota untuk aktif dalam mencapai tujuan, terakhir memberi inspirasi kepada anggota adalah pendamping memiliki banyak ide atau gagasan yang bisa menyelesaikan persoalan. Termasuk usaha kreatif atau memancing anggota untuk berusaha kreatif dan bermanfaat bagi sesama.
4. Fungsi pemberi konsultasi atau konselor, artinya pendamping dalam pemberdayaan semestinya mampu memberikan konsultasi atau sharing kepada anggota dalam permasalahan individu, usaha dan lainnya yang relevan dengan ranah sebagai konselor.
5. Fungsi memediasi atau mediator, artinya pendamping mampu memiliki fungsi memediasi anggota dalam memperoleh bimbingan teknis atau fasilitas yang diperlukan sesuai kebutuhan anggota. Misalnya anggota memiliki masalah finansial maka pendamping sebagai mediator ke lembaga ekonomi atau pihak yang memiliki modal finansial. Tentu dengan ketentuan atau syarat yang disepakati antara anggota dengan memberi pinjaman.
6. Fungsi membela atau pembelaan anggota atau advokasi, artinya pendamping memiliki fungsi sebagai pihak yang siap membela anggota jika memiliki masalah sengketa atau masalah lainnya, di mana posisi anggota dalam posisi benar dan memiliki dasar hukum.

2.1.2.3 Indikator Pendampingan Usaha

Indikator pendampingan menurut Suharto (dalam Rauf A, Hatu : 2010:248-249) yakni berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi, yaitu:

1. **Pemungkinan (Enabling) atau Fasilitasi**
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber
2. **Penguatan (Empowering)**
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan pengetahuan pengalaman masyarakat yang didampinginya, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.
3. **Perlindungan (Protecting)**
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demo kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pendamping juga dapat bertugas mencari sumber-sumber terkait informasi, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja dan sekaligus sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.
4. **Pendukung (Supporting)**
Pendampingan berjalan baik dengan adanya dukungan perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan dalam mengorganisasi kelompok yang didampingi, melainkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan berbagai keterampilan dasar yang dimiliki. Dalam menjalankan suatu usaha perlu adanya pendampingan agar usaha yang dikelola masing-masing anggota masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat berkembang dengan baik.

2.1.3 Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lain seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman juga terpenuhinya kebutuhan hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam UU No.6 tahun 1974 Keadaan sejahtera digambarkan dengan sangat jelas :

Sejahtera adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memun vgkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut UU No. 10 tahun 1992 mendefenisikan bahwa keluarga sejahtera yaitu :

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan yang serasi, selaras serta seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Anwas (dalam Jurnal PIRAMIDA I Wayan Ardika dan Gede Sujana

Budhiasa (2017:90) menyatakan petani adalah :

orang atau masyarakat yang bekerja atau melakukan pekerjaan atau memperoleh kehidupan dan pendapatan dari kegiatan memiliki ternak dan bercocok tanam di lahan pertanian. orang desa yang bercocok tanam disebut petani, yang artinya mereka melakukan cocok tanam di daerah pedesaan tidak dalam lingkup ruang tertutup di tengah kota.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani merupakan suatu bentuk pencapaian akhir yang di dapat dari kerja keras dari hasil pengolahan lahan, yang mendapatkan keuntungan dari setiap aktivitas pengolahan lahan dan memenuhi kebutuhan hidup atau makmur dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan dengan bantuan modal dan pendampingan yang diberikan.

2.1.3.1 Penentu Utama Kesejahteraan Petani

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di antara faktor-faktor tersebut, yang terpenting adalah tingkat pendapatan petani, karena berkaitan langsung dalam arah

positif terhadap tingkat kesejahteraan petani. Tingkat pendapatan itu sendiri ditentukan oleh dua faktor secara bersamaan yakni harga jual dan volume produksi, jadi dalam kasus petani padi pendapatannya ditentukan oleh harga gabah/beras dan volume padi/gabah yang dihasilkan.

Nilai tukar petani adalah rasio antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani. Artinya, besar-kecilnya nilai tukar petani selain oleh penghasilan petani juga ditentukan oleh biaya/ongkos produksi yang dikeluarkan petani. Dalam tanaman pangan adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan petani untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per-musim tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (misalnya, untuk padi) dan biaya sewa lahan jika bukan milik sendiri, biaya sewa alat/sarana usaha bukan milik sendiri, biaya upah pekerja jika menggunakan pekerja bukan anggota keluarga, dan biaya bunga kredit modal jika bukan modal sendiri. Harga gabah/padi yang dibayarkan kepada petani padi sangat menentukan pendapatan para petani, namun yang juga harus diperhitungkan oleh setiap petani adalah tingkat kemampuan/daya beli dari harga atau pendapatannya. Jika seorang petani mendapatkan hasil penjualan gabah/padi Nilai Tukar Petani yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator

untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai tukar petani juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi petani maupun biaya produksi petani. Semakin tinggi nilai tukar petani berarti secara relative semakin kuat daya beli petani. Oleh karena itu, nilai tukar petani dapat digunakan sebagai sebuah alat pengukur alternative tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, banyak petani menggunakan buruh yang umum disebut buruh tani, maka upah yang diterima buruh tani juga bagian penting dari kesejahteraan petani. Berbicara kesejahteraan petani berarti bukan saja kesejahteraan petani tetapi juga kesejahteraan buruh petani, yakni pekerja yang disewa/dipekerjakan oleh petani (baik pemilik lahan maupun penggarap lahan orang). Besarnya upah yang diterima oleh buruh tani juga sangat menentukan tingkat kesejahteraan buruh tani.

Dalam sektor pertanian lahan atau tanah merupakan input terpenting bagi pertanian untuk dapat menghasilkan produk seperti misalnya padi, karena setiap tanaman tumbuh di tanah. Dalam teori ekonomi klasik hanya dua input yang dianggap penting dalam kaitannya dengan fungsi produksi yakni lahan dan tenaga kerja, dan memang pada zaman tersebut pertanian merupakan sektor utama atau dominan di dunia. Namun demikian, Pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah dengan meningkatkan mekanisme dalam proses produksi.

2.1.3.2 Kriteria Kesejahteraan

Dalam Jurnal JIA Dian Komala Sari, Dwi Haryono dan Novi Rosanti (Kriteria Sajogyo 1997) Kriteria Kesejahteraan yaitu :

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun, yaitu total pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga. Guna mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun kemudian dibagi dengan harga beras per kilogram, Besarnya pengeluaran per kapita per tahun yang diukur dengan harga atau nilai beras setempat untuk daerah perdesaaan adalah

1. Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari 180 kg setara nilai beras/tahun.
2. Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 181– 240 kg setara nilai beras/tahun.
3. Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 241–320 kg setara nilai beras/tahun.
4. Nyaris miskin, apabila pengeluaran/ kapita/tahun antara 321–480 kg setara nilai beras/tahun.
5. Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 481–960 kg setara nilai beras/tahun.
6. Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih tinggi dari 960 kg setara nilai beras/tahun.

2.1.3.3 Indikator Kesejahteraan Petani

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2014) dalam Jurnal SOCIETA May Shiska Puspitasari dan Ira Primalasari, menyatakan bahwa ada 7 indikator dari kesejahteraan petani yaitu :

1. Kependudukan
Masalah kependudukan meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan struktur umur, rasio ketergantungan dan angka kelahiran yang merupakan aspek terpenting yang perlu diperhatikan.
2. Kesehatan dan gizi
Salah satu aspek terpenting kesejahteraan petani adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Gangguan kesehatan petani yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari.
3. Pendidikan
Pendidikan adalah indikator yang dapat memberikan gambaran bagaimana kemampuan membaca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah, fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan. Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum semua anak dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar.

4. Ketenagakerjaan
Indikator ketenagakerjaan digunakan untuk mengetahui gambaran keluarga petani mengenai jumlah anggota keluarga yang bekerja dan lama waktu bekerja serta mengetahui pekerjaan sampingan dibidang selain usaha tani dan diluar pertanian.
5. Taraf dan pola konsumsi
Taraf dan pola konsumsi meliputi rata-rata pengeluaran per kapita, perkembangan distribusi pendapatan, dan rata-rata pendapatan per kapita. Dan jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan.
6. Perumahan dan lingkungan
Perumahan dan lingkungan merupakan indikator yang memberikan gambaran tentang kehidupan keluarga yang dilihat dari fasilitas fisik rumah sebagai tempat tinggal dan lingkungan.
7. Sosial dan budaya
Semakin banyak seseorang tersebut memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial dan budaya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan peninjauan pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian ini. Terdapat tiga penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	I Gusti Agung Alit Semara Putra, I A. Nyoman Saskara (2013)	Efektivitas dan Dampak Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar	Metode : Kuantitatif Alat Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan Analisis Deskriptif, sedangkan untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah	Dilihat dari hasil perhitungan variabel input, variabel proses, dan variabel output bahwa tingkat keberhasilan program bantuan KUR di kota Denpasar tergolong berhasil dan efektif. Hasil analisis MC Nemar juga menunjukkan bahwa program bantuan KUR berdampak positif

			<p>digunakan metode statistik non parametrik MC Nemar. Unit Analisis di Kota Denpasar</p>	<p>terhadap pendapatan dan kesempatan kerja UMKM di Kota Denpasar. Sehingga disarankan kepada pemerintah tetap menjalankan program bantuan KUR tersebut untuk membantu permasalahan permodalan, akan tetapi perlu dilakukan evaluasi program ditinjau dari indikator variabel input, proses dan output sehingga tidak terjadi penyalahgunaan manfaat, sasaran dan tujuan diberikannya KUR.</p>
2.	Denny Fadillah Daulay (2015)	Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat	<p>Metode yang digunakan dalam analisis terhadap peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan pendapatan petani padi di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat adalah metode Ordinary Least Square (OLS) Alat analisis pengolahan data SPSS 17.0 for windows</p>	<p>Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan petani padi, ini terlihat dari beberapa indikator seperti adanya peningkatan pendapatan petani padi di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.</p>
3.	Nining Sudiyarti, dkk (2019)	Pengaruh Dana KUR Terhadap Pendapatan Usaha Mikro	<p>Metode : Kuantitatif Sumber Data : Wawancara</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh</p>

		Kecil Menengah di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	Unit Analisis Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($9,088 > 1,708$). Sedangkan nilai koefisien variabel pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Pukat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
--	--	---	--	---

Peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman”. Dalam penelitian terdahulu yang dilampirkan oleh peneliti menyatakan bahwa judul memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Persamaan judul penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah populasi, responden, waktu, tempat dan hasil penelitian.

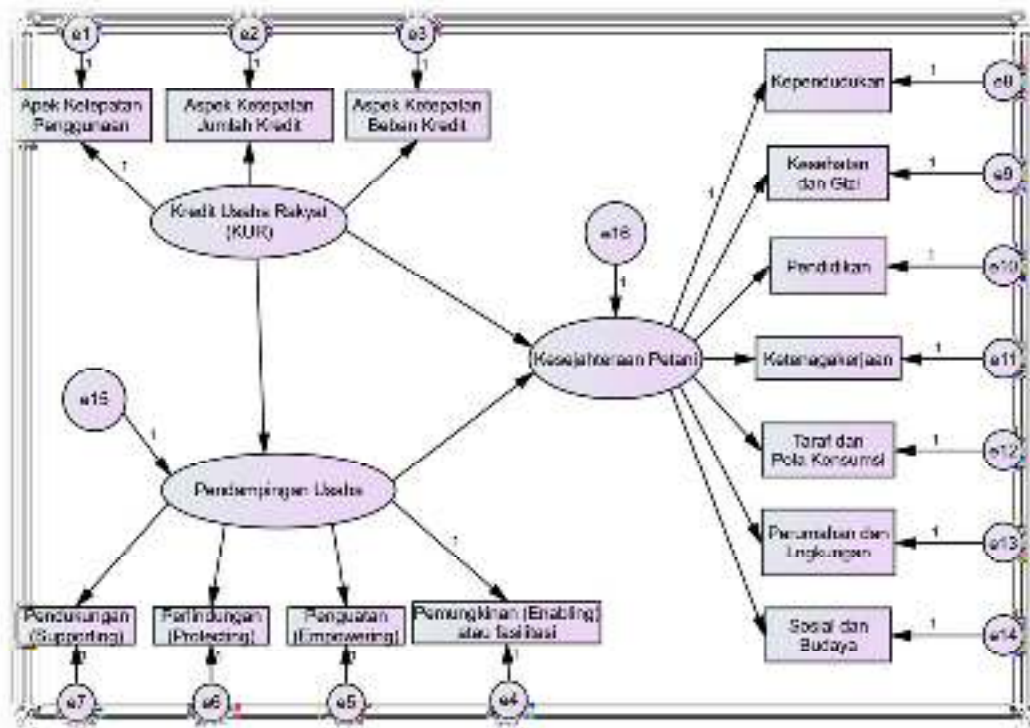
2.3 Kerangka Konseptual

Para petani merupakan bagian dari usaha mikro kecil menengah yang memiliki permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan serta mengembangkan usahanya. Masalah dan kendala yang dihadapi terbilang cukup biasa karena permasalahan yang dihadapi terkait permodalan. Untuk mengatasi masalah tersebut terbentuk sebuah program yang memberikan kemudahan kepada petani terkait modal yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program yang menyediakan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk membangun perekonomian bangsa dan negara dengan memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan sektor primer dan pemberdayaan usaha kecil serta memberikan arah hidup yang jauh lebih baik terhadap para petani dalam pengolahan lahan. Untuk mewujudkan kesejahteraan petani, peran serta pemerintah menjadi hal yang paling penting. Pendampingan langsung antara penyuluh dan para petani akan menciptakan pengolahan lahan pertanian jauh lebih baik.

Kerangka teoritik yang berlandaskan pada kajian pustaka, dilihat dari hubungan dari variabel, yaitu dengan hubungan sebab akibat adalah variabel yang saling berpengaruh akan variabel lainnya. Kerangka pemikiran dapat menghasilkan manfaat seperti persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap wawasan peneliti. Dalam rangka membuat hipotesis penelitiannya harus logis. Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman, maka kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana kebenarannya masih perlu untuk diuji. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Petani

H₂: Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Pendampingan Usaha

H₃ : Pendampingan Usaha berpengaruh terhadap Kesejahteraan Petani

H₄ : Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Petani melalui Pendampingan Usaha

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Metodologi Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. (Endang Widi Winarni, 2018:24).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman. Peneliti mulai melaksanakan penelitian ini terhitung dari bulan Januari hingga Februari.

3.3 Jenis Data

Berdasarkan prosedur atau cara menghimpunnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Nalom Siagian (2021:19), ada dua jenis data yaitu:

1. Data Primer (Primary Data)

Yaitu data yang dihimpun dan diolah serta dianalisis sendiri oleh peneliti/observer secara langsung dari objeknya. Teknik pengumpulan data primer, sebagaimana dalam suatu penelitian pada umumnya, banyak dipengaruhi oleh rumusan permasalahan penelitian yang telah dibuat dalam rancangan riset. Maka dalam diskursus ini hal elementer bagi seorang peneliti bukan sekedar mengetahui bagaimana pelaksanaan penghimpunan data tersebut, namun juga memahami hal yang mempengaruhi teknik pengumpulan data tersebut. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan menghimpun data melalui kuisioner.

Dengan demikian peneliti memilih Kuisioner dalam menghimpun data.

2. Data Sekunder (Secondary Data)

Yaitu data penelitian yang dihimpun dari bentuk data orang lain yang sudah jadi dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh orang lain. Dalam konteks ini data sekunder bisa diperoleh dari misalnya publikasi ilmiah, buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang telah diterbitkan.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Nalom Siagian (2021:53), Populasi dapat dikatakan “Kumpulan” banyak sampel penelitian, sehingga didalam penelitian sangat diperlukan penentuan sampel tersebut sebagai cara untuk “memudahkan” dalam membaca fenomena atau realitas yang ada. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman yang bergabung dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana jumlah penduduk di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman sebanyak 1050 KK. Petani yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai objek penelitian ini karena mereka yang merasakan

langsung perbedaan tingkat kesejahteraan. Sedangkan sampel adalah refleksi langsung dari populasi, dimana potret realitas yang akan di data berada sepenuhnya dalam sampel tersebut. (Nalom Siagian 2021:54).

Menurut Singgih Santoso (2011: 70) dalam Siswoyo Haryono dan Parwoto Wardoyo, untuk model SEM dengan jumlah variable laten (konstruk) sampai lima buah, dan setiap konstruk dijelaskan tiga atau lebih indicator, jumlah sampel 100 – 150 data sudah dianggap memadai. Untuk itu, jumlah sampel 100 data pada umumnya dapat diterima sebagai sampel yang representative pada analisis SEM.

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui Teknik non-probability sampling pendekatan Snowbaal sampling. Teknik non-probability sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang tidak melibatkan unsur probabilitas, sehingga dapat dilakukan secara acak dan sederhana, Adapun Quota Sampling artinya jenis Teknik pengambilan data Nonprobability Sampling yang dilakukan melalui klasifikasi populasi, menentukan proporsi sampel tiap kelas, menetapkan quota untuk interviewer Teknik sampling ini termasuk non random sampling, karena tidak memperhitungkan variasi antara setiap unit sampling dan kemungkinan kekeliruan sampel. Jenis convenience sampling atau sampel yang dipilih secara kebetulan. Adapun jenis Sampling pada Nonprobably sampling yang digunakan dalam penelitian ini setelah melakukan quota sampling yaitu Snowball Sampling. Snowball Sampling yaitu memilih responden via probabilitas, responden berikutnya atas rekomendasi responden sebelumnya. (Nalom Siagian 2021:57)

Pedoman penentuan besarnya sample size (ukuran sampel) untuk SEM menurut Mahmud Sholihin dan Dwi Ratmono (2013:10) adalah :

1. Bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum (maximum likelihood estimation) besar sampel yang disarankan antara 100 hingga 200, dengan minimum sampel adalah 50.
2. Sebanyak 5 – 10 kali jumlah parameter yang ada di dalam model.
3. Sama dengan 5-10 kali jumlah indikator dari keseluruhan variabel laten.

Berdasarkan pendapat di atas, karena dalam penelitian ini pada awalnya terdapat 14 variabel observed atau indikator maka jumlah sampel penelitian yang digunakan adalah $8 \times 14 = 112$ responden. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan minimal (minimum requirement) maka banyaknya sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 112 sampel yang akan dipilih dari perwakilan masyarakat petani pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dengan pendekatan Snowball sampling yaitu Responden awal dipilih via Probabilitas, responden berikutnya atas rekomendasi responden sebelumnya.

3.5 Defenisi Konseptual, Operasional dan Instrumen

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat dan pendampingan sebagai variable eksogen, kesejahteraan petani sebagai variable endogen.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tentang penelitian untuk diolah dalam rangka memecahkan masalah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan pengajuan pernyataan melalui skala liskert. Skor setiap variable diperoleh dari setiap butir pernyataan yang dikembangkan dari beberapa komponen indicator dengan 5 pilihan jawaban yaitu : (SS) sangat setuju,

(S) Setuju, (N) Netral, (TS) Tidak Setuju, (STS) Sangat Tidak Setuju. Skor 5 bagi yang menjawab SS, 4 bagi yang menjawab S, 3 bagi yang menjawab N, 2 bagi yang menjawab TS dan 1 bagi yang menjawab STS.

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

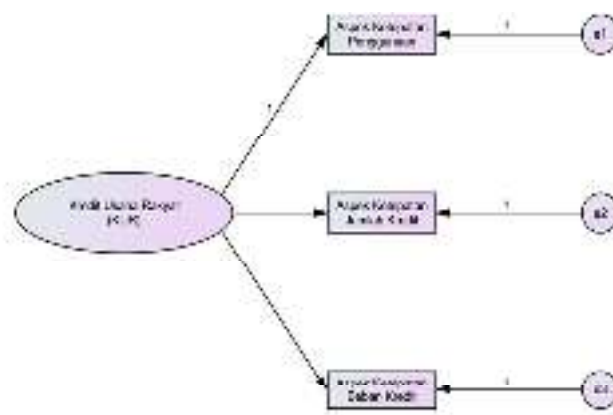
1. Defenisi Konseptual

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

2. Defenisi Operasional

Indikator Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam penelitian ini adalah : Aspek Ketepatan Penggunaan, Aspek Ketepatan Jumlah Kredit, Aspek Ketepatan Beban Kredit

Gambar 3.1
Bagan Konstrak Variabel Laten Karakteristik Kredit Usaha Rakyat(KUR)



3. Instrumen Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variable Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat dikembangkan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Instrumen Kredit Usaha rakyat (KUR)

Variabel	Indikator	Kode	Sumber Data
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1. Tepat Penggunaan	KUR1	Marfuah dan Sri, (2019)
	2. Tepat Jumlah Kredit	KUR2	
	3. Tepat Beban Kredit	KUR3	

b. Pendampingan Usaha

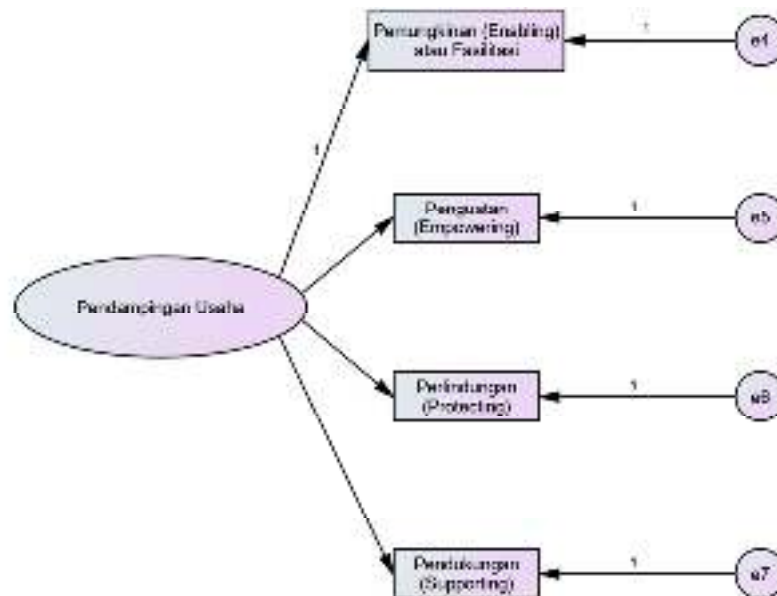
1. Defenisi Konseptual

Pendampingan usaha merupakan aktivitas untuk memampukan seseorang menjadi berdaya dalam kehidupan yang layak dalam berusaha atau melakukan kegiatan usaha. Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi.

2. Defenisi Operasional

Indikator Pendampingan dalam penelitian ini adalah : Pemungkinan (Enabling) atau Fasilitasi, Penguatan (Empowering), Perlindungan (Protecting) dan Pendukungan (Supporting).

Gambar 3.2
Bagan Konstrak Variabel Laten Karakteristik Pendampingan Usaha



3. Instrumen Pendampingan Usaha

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variabel pendampingan ini dapat dikembangkan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Instrumen Pendampingan Usaha

Variabel	Indikator	Kode	Sumber Data
Pendampingan	1. Pemungkinan (Enabling) atau Fasilitas	P1	Rauf A, Hatu (2010)
	2. Penguatan (Empowering)	P2	
	3. Perlindungan (Protecting)	P3	
	4. Pendukung (Supporting)	P4	

c. Kesejahteraan Petani

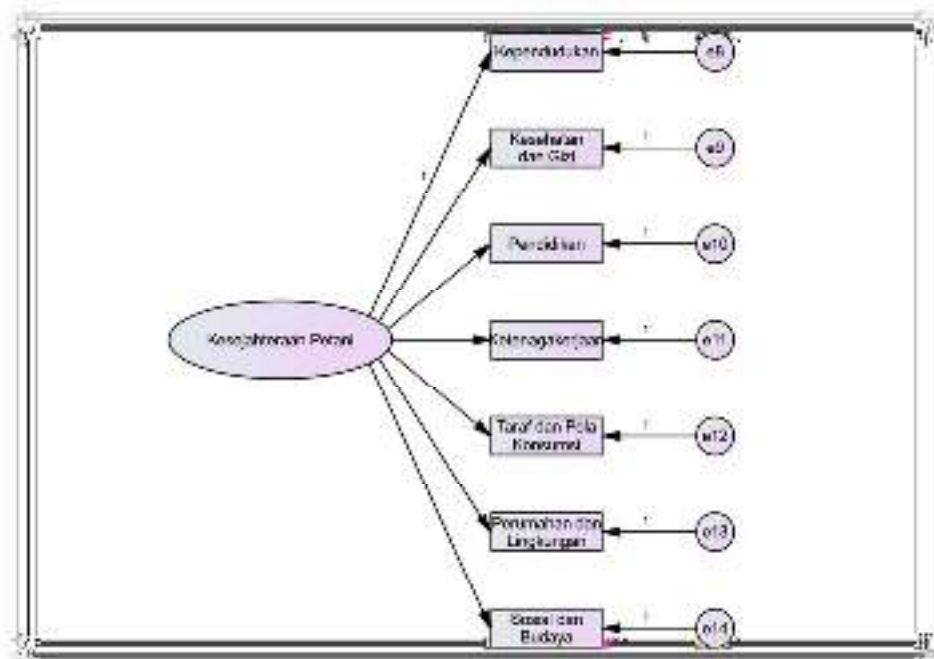
1. Defenisi Konseptual

Kesejahteraan petani merupakan hasil kerja keras yang didapat dari aktivitas pengolahan lahan. Dalam kesejahteraan Petani mendapatkan keuntungan dari setiap aktivitas pengolahan lahan, makmur dan mencapai target itu keberhasilan yang didapat, dengan bantuan modal dan pendampingan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan dasar didalam kehidupan dan makmur dalam hidup.

2. Defenisi Operasional

Indikator Pendampingan dalam penelitian ini adalah : Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan dan Sosial dan Budaya.

Gambar 3.3
Bagan Konstrak Variabel Laten Karakteristik Kesejahteraan Petani



3. Instrumen Kesejahteraan Petani

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variable Kesejahteraan Petani ini dapat dikembangkan seperti tabel dibawah ini

Tabel 3.4
Instrumen Kesejahteraan Petani

Variabel	Indikator	Kode	Sumber Data
Kesejahteraan Petani	1. Kependudukan	KP1	Menurut Badan Pusat Statistik (BPS (2014)).
	2. Kesehatan dan Gizi	KP2	
	3. Pendidikan	KP3	
	4. Ketenagakerjaan	KP4	
	5. Taraf dan Pola Konsumsi	KP5	
	6. Perumahan dan lingkungan	KP6	
	7. Sosial dan Budaya	KP7	

3.6 Teknik Analisis Data Penelitian

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan karakteristik jawaban responden untuk masing-masing konstruk atau variable yang diteliti. Hasil analisis deskriptif selanjutnya digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing konstruk atau variable penelitian.

3.6.2 Analisis Infrensial Statistik dengan Analisis SEM

3.6.2.1 Analisis Faktor Konfirmatori

Analisis factor konfirmatori dirancang untuk menguji unidimensionalitas dari suatu lkonstruk teoritis. Analisis ini sering juga disebut menguji validitas suatu konstruk teoritis. Variable laten yang digunakan dalam penelitian ini dibentuk

berdasarkan konsep teori dengan beberapa indicator. Analisis konfirmatori ini untuk menguji apakah indicator pembentuk konstruk laten merupakan indicator yang valid sebagai pengukur konstruk laten.

3.6.2.2 Analisis Model Struktural

Analisis Structural Equation Modelling (SEM) secara full model setelah dilakukan analisis tahap tingkat unidimensionalitas dari indicator-indikator pembentuk variable laten atau konstruk eksogen maupun endogen yang diuji dengan confirmatory factor analisis. Analisis hasil pengolahan data pada full model SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistic.

3.6.2.3 Evaluasi Model Struktural

Sebelum dilakukan pengujian secara statistik terhadap pengaruh masing-masing variable eksogen terhadap variabel endogen dalam fit model (pengujian hipotesis penelitian), terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap model structural yang dihasilkan oleh fit model dalam penelitian ini.

3.7 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai t-Value dengan tingkat signifikan 0,05. Nilai t-value dalam program Amos 22 merupakan nilai Critical Ratio (C.R) pada Regression weights : (Group number 1 – Default model) dari fit model. Apabila nilai Critical ratio (CR) $\geq 1,967$ atau nilai probabilitas (P) $\leq 0,05$ maka hipotesis penelitian diterima dan sebaliknya.

